

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan pembangunan berkelanjutan yang isinya untuk kesejahteraan bersama, pembangunan yang isinya membicarakan mengenai keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang membicarakan mengenai mutu lingkungan dan keadilan serta tercapainya sistem pengelolaan yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup untuk generasi yang akan datang (Saputra et al., 2021). Dalam SDGs terdapat 4 (empat) kategori pilar pembangunan, yaitu Pilar Pembangunan Sosial (tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5); Pilar Pembangunan Ekonomi (tujuan 7, 8, 9, 10, 17); Pilar Pembangunan Lingkungan (tujuan 6, 11, 12, 13, 14, 15); dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (tujuan 16) (Nurfindarti, 2019).

Pengelolaan sampah padat menjadi permasalahan lintas sektor yang mempengaruhi ketiga aspek tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: lingkungan, ekonomi, dan sosial (Rodić & Wilson, 2017). Sampah dapat dikaitkan ke dalam 4 dari 17 tujuan SDGs, yaitu: SDGs 3 target 3.9 (mengurangi angka kematian dan penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia berbahaya dan juga polusi dan kontaminasi udara, air dan tanah); SDGs 6 target 6.3 (meningkatkan kualitas air, pengolahan air limbah, dan penggunaan kembali yang aman); SDGs 11 target 11.6 (mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan perkapita di perkotaan, termasuk dengan memberikan perhatian khusus kepada kualitas udara dan kotamadya dan manajemen limbah lainnya); dan SDGs 12 target 12.4 (bertanggungjawab terhadap

pengelolaan bahan kimia dan limbah) (Sharma et al., 2021). Adanya tujuan tersebut, diharapkan pada tahun 2030 dapat mengurangi dampak dari sampah terhadap lingkungan (Rudiyanto, 2020).

Pengelolaan sampah telah menjadi isu global pada abad ke-21 dimana setiap negara telah menunjukkan komitmen untuk mengatasinya, terutama ketika membuat kebijakan tentang kesehatan masyarakat dan lingkungan (Okoli et al., 2020). Isu mengenai sampah secara global diperkirakan akan meningkat menjadi 3,4 miliar ton pada tahun 2050 dari 2,01 miliar ton pada tahun 2016, jika tidak ada pencegahan yang dilakukan (Kaza et al., 2018). Hal ini membuat pengelolaan sampah merupakan layanan penting yang harus disediakan di perkotaan khususnya di negara yang sedang berkembang dengan pendapatan rendah hingga menengah (Hoorweg & Bhada-Tata, 2012).

Persoalan timbulan sampah saat ini tengah dihadapi oleh Indonesia. Berdasarkan laporan KLHK tahun 2022, jumlah timbulan sampah di Indonesia sebesar 68,7 juta ton/tahun didominasi oleh sampah organik, khususnya sampah sisa makanan sebesar 41,27%. Kurang lebih 38,28% dari sampah tersebut bersumber dari rumah tangga. Lebih lanjut, sebanyak 65,83% sampah di Indonesia masih diangkut dan dibuang ke *landfill* (KLHK, 2023). Sampah tersebut pada akhirnya akan berkontribusi terhadap bertambahnya timbulan sampah di TPA yang akan menimbulkan pencemaran lingkungan dan menambah produksi gas metana dari sampah (Setiawan, 2021).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Meijer et al., 2021) menunjukkan bahwa 6 (enam) dari 10 (sepuluh) negara ASEAN termasuk Indonesia yang berada

di peringkat ke lima dengan jumlah sampah plastik laut tertinggi. Berikut gambar mengenai 10 (sepuluh) negara yang menghasilkan sampah plastik terbesar di dunia:



Gambar 1.1. Negara Penghasil Sampah Laut Terbesar di Dunia
Sumber: Meijer et.al, (2021)

Sampah yang tidak terkelola tersebut biasanya dibuang begitu saja di aliran air atau lahan kosong atau dibakar di udara terbuka dekat pemukiman penduduk (Rodić & Wilson, 2017). Sampah yang dibuang begitu saja dapat menyumbat saluran air, yang mengakibatkan banjir dan menimbulkan kerusakan serta mempengaruhi kesehatan masyarakat (Lamond et al., 2012; Wilson et al., 2013). Permasalahan sampah plastik tidak hanya terjadi di laut saja, tetapi juga berdampak pada sungai-sungai. Data dari *Nature Communications* mengungkapkan bahwa empat sungai di Indonesia yaitu Brantas, Solo, Serayu, dan Progo termasuk di antara 20 sungai paling tercemar di dunia (The ASEAN Post Team, 2018).

Pemerintah telah berupaya dalam mengatasi persoalan sampah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah kemudian membuat regulasi turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

Pengelolaan sampah di dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah juga menjadi tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang pengelolaan sampah.

Provinsi Jawa Tengah saat ini tengah menghadapi darurat sampah yang memerlukan perlakuan khusus melalui kerjasama dari berbagai pihak untuk menanggulangi timbulan sampah (Jatengprov, 2019). Pelayanan sampah di Jawa Tengah masih terpusat pada kawasan perkotaan, sehingga pelayanan sampah di tingkat kabupaten relatif kecil karena hanya kawasan perkotaan saja yang terlayani dibandingkan dengan total wilayah pedesaan (RPJMD Jawa Tengah, 2018). Berikut adalah data jumlah timbulan sampah dan jumlah sampah yang terangkut ke TPA per kabupaten/kota di Jawa Tengah:

Tabel 1.1. Volume Sampah Rata-Rata per Hari di Jawa Tengah, 2017 - 2020

Tahun	Timbulan Sampah, m ³ (Ton)	Presentase Timbulan Sampah (%)	Terangkut m ³ (Ton)	Presentase Sampah Terangkut (%)
2017	5.322.088	4,75	1.434.033	26,94
2018	5.380.989	1,11	1.279.069	24,00
2019	5.604.080,65	4,15	2.774.189,20	49,50
2020	6.055.617,00	8,05	2.626.441,58	43,37

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (2017-2020). Data diolah (2023).

Berdasarkan tabel di atas timbulan sampah di Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini tidak diimbangi dengan bertambahnya volume sampah yang terangkut secara signifikan. Peningkatan jumlah sampah tersebut merupakan dampak dari populasi perkotaan yang terus meningkat, sebagian besar disebabkan oleh urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perubahan pola konsumsi dan perubahan komposisi sampah (Wilson et al., 2015).

Pelayanan pengelolaan sampah menjadi isu yang hampir terjadi di setiap daerah. Sama halnya dengan Kabupaten Wonosobo saat ini menjadi salah satu wilayah yang rentan darurat sampah (Masitoh, 2022). Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengeluarkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dan Perbup Wonosobo Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pentingnya penanganan sampah di Kabupaten Wonosobo secara tepat saat ini perlu diperhatikan mengingat keterbatasan daya tampung TPA Wonorejo. Dilansir dalam akun *Instagram* @bpbdwonosobo, TPA Wonorejo sebagai pusat pembuangan sampah di Wonosobo berdiri sejak 1989 memiliki luas 2,9 Ha dengan desain daya tampung maksimal 1.093.000 m³ dan jumlah sampah yang tertimbun pada 2021 mencapai 1.103.500 m³, artinya TPA Wonorejo saat ini telah mengalami kelebihan daya tampung sampah (BPBD Wonosobo, 2022). Dalam permasalahan pembuangan sampah di TPA juga dialami Kota Candigarh, jumlah luas lahan yang kecil tidak sebanding dengan timbulan sampah. Faktor kelangkaan lahan dan kurangnya keterampilan teknis untuk menangani volume sampah yang besar, serta

kurangnya kebijakan pemerintah dapat memperburuk situasi (Rana et al., 2014). Oleh karena itu, dalam konteks di atas, sangat penting untuk memastikan keamanan dan kelayakan pembuangan sampah yang dihasilkan untuk menjaga kenyamanan dan efisiensi kota (Jerin et al., 2022).



Gambar 1.2. Kondisi TPA Wonorejo
Sumber: Observasi Lapangan (2023)

Bertambahnya volume timbulan sampah di setiap daerah dipicu oleh perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas di masyarakat (Novaldi et al., 2022). Berikut merupakan tabel pertumbuhan penduduk dan pendapatan per kapita Kabupaten Wonosobo:

Table 1.2. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Wonosobo 2017 - 2021

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Presentase (%)	PDRB per Kapita (Rp)	Presentase (%)
2017	784.091	0,44	20.728.077	5,31
2018	787.347	0,42	22.216.917	7,18
2019	790.491	0,40	23.851.174	7,36
2020	879.124	11,21	21.450.653	-10,06
2021	886.613	0,85	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, (2017-2021). Data diolah (2023).

Berdasarkan data BPS Kabupaten Wonosobo di atas, pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten

Wonosobo terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pendapatan per kapita Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017-2019 terus mengalami peningkatan, namun pada 2020 mengalami penurunan sebesar -10,06 %. Penelitian yang dilakukan oleh (Saei, 2012) mengungkapkan bahwa pertumbuhan penduduk yang konstan, urbanisasi yang tidak terkendali dan kemajuan ekonomi berdampak pada memburuknya pengelolaan sampah sehingga menjadi tantangan bagi sektor publik untuk bekerja sesuai dengan harapan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, berikut merupakan tabel data timbulan, pengurangan, penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Wonosobo:

Tabel 1.3. Data Timbulan, Pengurangan, Penanganan, Pengelolaan Sampah di Kabupaten Wonosobo

Uraian	2019	2020	2021
Jumlah timbulan sampah (m ³) (ton/tahun)	115.411,69	128.352,10	132.496,46
Persentase timbulan sampah	0,08	11,21	3,23
Jumlah sampah yang dapat dikurangi (m ³) (ton/tahun)	16.621,81	17.326,80	27.607,35
Persentase pengurangan sampah	14,40	13,50	20,84
Jumlah sampah yang tertangani (m ³) (ton/tahun)	31.025	36.865	37.230
Persentase penanganan sampah	26,88	28,72	28,10
Jumlah sampah yang dikelola (m ³) (ton/tahun)	47.646,81	54.191,80	64.837,35
Persentase pengelolaan sampah	41,28	42,22	48,94

Sumber: DLH Kabupaten Wonosobo (2019-2021). Data diolah (2023)

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo di atas, timbulan sampah yang dihasilkan pada tahun 2019 – 2021 selalu mengalami kenaikan dengan estimasi timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat sebesar 0,40 kg per jiwa. Namun jumlah timbulan sampah tidak sepenuhnya dapat

dikurangi. Misalnya, pada tahun 2021 timbulan sampah yang berhasil dikurangi sebesar 20,84% atau 27.607,35 m³. Artinya jumlah sampah yang berhasil dikurangi belum memenuhi target pengurangan sampah yaitu 24% pada 2021. Selain itu pada tahun yang sama jumlah sampah tertangani masih tergolong rendah yaitu 28,10% atau 37.230 m³, hal ini masih jauh dari target penanganan sampah yaitu 74%.

Tingkat pengelolaan sampah di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2019 – 2021 masih tergolong rendah. Capaian persentase pengelolaan sampah pada tahun 2019 sebesar 41,28%, tahun 2020 sebesar 42,22, dan pada tahun 2021 persentase pengelolaan sampah baru 48,94%. Hal ini menunjukkan masih terdapat 51,06% sampah tidak dikelola dengan baik dan benar yang bisa saja dibuang langung ke lingkungan. Adapun studi yang dilakukan oleh (Prodhan, 2020) mengungkapkan bahwa sekitar setengah dari sampah yang dihasilkan di Kota Dhaka dikumpulkan dengan baik oleh pihak pengelola sampah dan hampir 40-60% sampah tetap tidak terkumpul dan tidak dibuang dengan aman, sekitar 80% sampah tersebut merupakan sampah organik.

Mengacu pada permasalahan pengelolaan sampah di India yang ditulis oleh (Joshi & Ahmed, 2016; Kumar et al., 2017) dikarenakan kurangnya pelatihan dalam pengelolaan sampah dan profesional pengelolaan limbah yang berkualitas, infrastruktur dan anggaran tidak dapat dipertanggungjawabkan, kurangnya rencana dan metode yang tepat, dan lemahnya penegakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Jerin et al., 2022) bahwa pengelolaan limbah padat yang tidak baik menimbulkan sejumlah masalah termasuk kendala

sumber daya dengan pembiayaan terbatas, kesulitan teknis, kurangnya kesadaran publik, kurangnya koordinasi antara departemen pemerintah; koordinasi dengan swasta maupun koordinasi dengan sektor publik lainnya

Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Okoli et al., 2020) mengungkapkan bahwa implementasi peraturan badan pengelolaan sampah di Rivers State tidak berjalan secara efektif, hal ini dikarenakan lembaga yang lemah, sikap manajemen yang buruk, dan pendanaan yang tidak mencukupi untuk operasional. Pihak kontraktor selaku pengelola sampah tidak melaksanakan tugas dengan baik, sehingga pengangkutan sampah seringkali mengalami keterlambatan, hal ini berdampak pada sampah berserakan di jalan bahkan masuk kedalam aliran air sungai. Selain itu terdapat praktek pembuangan sampah di sembarang tempat yang dibiarkan begitu saja. Sarana dan prasarana seperti truk pengangkut sampah tidak laik jalan. Sumber daya manusia sebagai petugas kebersihan tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki keahlian bahkan tidak memperhatikan keselamatan, kesehatan, kerja.

Permasalahan mengenai pengelolaan sampah juga terdapat di Kabupaten Cirebon, dalam implementasinya terdapat hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya sumberdaya, terbatasnya fasilitas lahan pembuangan sampah, kurangnya kesadaran masyarakat (Arisandi et al., 2019). Hal serupa juga diungkapkan oleh (Febryanti & Suryaningsih, 2018) dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan, terdapat permasalahan terkait sosialisasi kebijakan yang belum menyentuh seluruh masyarakat; respon masyarakat yang tidak mendukung kebijakan penanganan sampah; dan proses penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang menunjukkan

penolakan terhadap kebijakan tersebut. Faktor kendala kebijakan penanganan sampah adalah sumber daya dan kondisi sosial dari masyarakat Semarang. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Ersi Ariesti, 2021) mengungkapkan bahwa penanganan sampah di Kecamatan Kuantan Tengah belum terlaksana secara optimal, secara keseluruhan proses penanganan sampah membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak. Agar dampak dari penumpukan-penumpukan sampah yang terlalu lama tidak menjadikan persoalan baru bagi lingkungan.

Pemilihan lokus penelitian di Kabupaten Wonosobo karena permasalahan pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal. Kabupaten Wonosobo menghadapi permasalahan dalam pengelolaan sampah seperti belum tercapainya target pengelolaan sampah, kondisi sarana dan prasarana belum baik, jumlah timbulan sampah sudah melewati batas penampungan serta usia pakai TPA hampir habis, meningkatnya jumlah timbulan sampah setiap tahunnya, kesadaran masyarakat masih kurang, dan kecilnya anggaran pengelolaan sampah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini penting dilakukan karena untuk mengetahui permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Wonosobo yang masih belum optimal. Sehingga pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah mengapa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Wonosobo belum optimal?

1.2. Identifikasi Masalah

1. Belum tercapainya target pengelolaan sampah.
2. Sarana prasarana pengelolaan sampah belum baik.

3. Jumlah timbulan sampah sudah melewati batas penampungan serta usia pakai TPA hampir habis.
4. Meningkatnya jumlah timbulan sampah setiap tahunnya.
5. Kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah masih kurang.
6. Kecilnya anggaran pengelolaan sampah.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketepatan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 (Pasal 13 Tentang Penanganan Sampah)?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam Ketepatan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 (Pasal 13 Tentang Penanganan Sampah)?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan. Adapun tujuan penelitian dari perumusan masalah di atas yaitu:

1. Menganalisis Ketepatan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 (Pasal 13 Tentang Penanganan Sampah).
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam Ketepatan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 (Pasal 13 Tentang Penanganan Sampah).

1.5. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak. Adapun kegunaan penelitian ini, antara lain:

1.5.1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik terutama mengenai studi kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik serta dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan di Kabupaten Wonosobo pada khususnya terkait topik dalam penelitian yaitu implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

1.5.2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan administrasi publik, menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti sendiri. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan perbandingan dalam penelitian selanjutnya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kebijakan pengelolaan sampah yang dilaksanakan di Kabupaten Wonosobo untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, khususnya dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Wonosobo, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang tepat di Kabupaten Wonosobo.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengambil rujukan dari beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan tema atau gejala mengenai pengelolaan sampah yang dijadikan sebagai acuan dan untuk mendukung dalam menyusun kerangka teori dan konsep.

Penulisan penelitian terdahulu ini untuk menghindari adanya kesamaan atau plagiasi. Pemetaan ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan yang ada pada penelitian-penelitian terdahulu sehingga dapat dijadikan gambaran dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penulisan penelitian ini pada umumnya membahas mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon oleh Arisandi, Nariyah dan Nursahidin (2019) menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan yaitu model implementasi kebijakan Edwards III yang mengemukakan 4 variabel yang mempengaruhi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel komunikasi, sumberdaya, dan struktur birokrasi belum optimal, selain itu terdapat keterbatasan fasilitas lahan pembuangan sampah, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah.

Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah oleh Febriyanti dan Suryaningsih (2018). Menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan yaitu 5 ketepatan implementasi kebijakan Riant Nugroho, ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses, Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan ketepatan kebijakan; ketepatan target; serta ketepatan proses kurang optimal. Sedangkan ketepatan pelaksana dan ketepatan lingkungan sudah berjalan baik. Faktor pendorong yaitu karakteristik agen pelaksana, hubungan antar organisasi, disposisi implementor. Faktor penghambat yaitu sasaran kebijakan, sumber daya dan kondisi sosial masyarakat Kota Semarang.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan oleh Hastuti, Faizal dan Titi (2021). Menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan adalah model implementasi kebijakan Gorge C. Edwards III. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Perda No. 01 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah berjalan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan isi kebijakan, serta masih ada ketidaksesuaian yang didapat dari hasil pelaksanaan kebijakan. Ada pun beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan sampah rumah tangga di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018-2019 oleh Ariesti (2021). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan yaitu model implementasi kebijakan Gorge C. Edwards. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penanganan sampah di Kecamatan Kuantan Tengah membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak agar dampak dari penumpukan-penumpukan sampah yang terlalu lama tidak menjadikan persoalan baru bagi lingkungan.

Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo oleh Baskoro (2021). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi Van Meter dan Van Horn. Hasil Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah dikatakan bahwa kebijakan belum tercapai pengelolaan sampah belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Sumberdaya manusia terbatas dan sumberdaya peralatan masih manual. Pihak organisasi formal memiliki karakter disiplin dalam kinerjanya dan informal memiliki karakter responsif dalam penanganan. Sikap para pelaksana kebijakan mempunyai beberapa pelaksana seperti penanggungjawab kebijakan, pengawas TPST, dan tukang angkut sampah. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana kurang baik. Kebijakan yang dilakukan antara sosial, ekonomi, dan politik masih belum seimbang.

Tinjauan kemajuan implementasi kebijakan pengelolaan limbah padat di Dhaka, Bangladesh oleh Jerin (2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan multi metode dengan mengkaji 24 dokumen kebijakan/strategi; Analisis kesenjangan implementasi dengan desk review yang ekstensif dan data yang diperoleh dari pendekatan kualitatif dan lokakarya produksi bersama. Studi menemukan bahwa beberapa rencana aksi telah diperkenalkan namun tidak semuanya memiliki implementasi yang tepat seperti mematuhi praktik pemilahan sampah dan daur ulang dari rumah tangga ke tingkat TPA. Kurangnya pemantauan dan koordinasi di antara lembaga pelaksana kebijakan yang ada telah muncul sebagai kekhawatiran yang signifikan di Bangladesh.

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu yaitu fokus terhadap kebijakan pengelolaan sampah. Kemudian metode yang digunakan analisis deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori 5 ketepatan kebijakan Riant Nugroho untuk menilai Ketepatan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 (Pasal 13 Tentang Penanganan Sampah).

Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu lokus penelitian ini Kabupaten Wonosobo. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Ketepatan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 (Pasal 13 Tentang Penanganan Sampah) menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier. Dalam pembahasan hasil temuan penelitian dibantu dengan *software* Atlas.ti.

Tabel 1.4. Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Judul, Jurnal	Metode dan Teori	Hasil Penelitian
1.	<p>Arisandi, R., Nariyah, H., & Nursahidin. (2019).</p> <p>Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.</p> <p>Jurnal Publika Unsagati Cirebon, 7(2), 107–113.</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p> <p>Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Publik Menurut Winarno (2014: 19) Secara umum, istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah). 2. Implementasi Kebijakan Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014:148) mendefinisikan implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (<i>benefit</i>), atau suatu jenis keluaran yang nyata (<i>tangible output</i>). 3. Model Implementasi Kebijakan Menurut Edwards III dalam Subarsono (2013:90-92) mengemukakan bahwa terdapat 4 variabel yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. 	<p>Hasil penelitian didapatkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaannya dilihat dari empat variabel Edwards III menunjukkan bahwa variabel komunikasi, sumberdaya, dan struktur birokrasi belum optimal, selain itu terdapat keterbatasan fasilitas lahan pembuangan sampah, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah.</p>

2.	<p>Sari, D. E. K. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013. JOM, 5(3), 2–15 .</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deksriptif dengan pendekatan kualitatif.</p> <p>Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Teori Implementasi Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menurut Ripley dan Franklin (1982) mengemukakan bahwa setidaknya ada 3 (tiga) faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu: kejelasan tujuan-tujuan program dan tingkat consensus diantara pelaksana atas tujuan-tujuan tersebut, tingkat perubahan dari kebiasaan-kebiasaan lama yang dikehendaki program, tipe-tipe orang yang memperoleh manfaat dan klien terbatas, yaitu orang dan kelompok yang menjadi target implementasi. - George C. Edward III terdapat empat variable yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen: staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. 	<p>Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu: belum memadainya jumlah sumber daya staf atau pekerja kebersihan di Kabupaten Karimun, informasi yang disampaikan belum mencakup seluruh elemen baik pemerintah maupun masyarakat, tidak adanya pendelegasian wewenang dari Pemerintah Kabupaten Karimun kepada pemerintah tingkat kecamatan, sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah masih belum mencukupi.</p>
3.	<p>Ramadhan, D. (2019). Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p> <p>Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1. Kebijakan Publik</p>	<p>Hasil penelitian ini didapatkan bahwa proses pengelolaan sampah dengan konsep 3R sangat dibutuhkan melalui beberapa tahapan, pertama, pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang</p>

	<p>Sampah Dengan Konsep 3R Tahun 2017.</p> <p>Jom Fisip, 6(2), 1–13.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menurut Thomas R. Dye dalam Dunn terdapat tiga (3) elemen dalam pembentukan yaitu kebijakan public, perilaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan. - Menurut Dunn tahap pembuatan kebijakan terbagi menjadi lima tahapan, yaitu: Penyusunan agenda, Formulasi Kebijakan, Adposi/Legitimasi kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi Kebijakan. <p>2. Partisipasi Masyarakat</p> <p>Menurut Santosa (1998: 13) bahwa “Partisipasi didefinisikan sebagai Karakteristik mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan”.</p> <p>3. Jenis-jenis Partisipasi Masyarakat,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menurut Uphoff, Cohen, dan Goldsmith (1979: 51) membagi partisipasi ke dalam beberapa tahapan, yaitu: Tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap menikmati hasil, dan tahap evaluasi. - Menurut Sastropoetro (1986: 16-18) jenis partisipasi meliputi Pemikiran; Tenaga; Pemikiran dan Tenaga; Keahlian; Barang; Uang. 	<p>dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dan kebersihan Pekanbaru dalam mengurangi sampah dengan konsep 3R. Tahap kedua mensosialisasikan cara menggunakan sampah yang masih digunakan dan mendaur ulang sampah yang dapat didaur ulang, sehingga memiliki nilai jual.</p>
--	--	---	--

4.	<p>Hastuti, Bella Dwi, Faizal Anwar, dan Titi Darmi (2021)</p> <p>Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan</p> <p><i>Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia Vol. 2 No. 2</i></p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif</p> <p>Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birorkrasi. 	<p>Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Perda No. 01 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah berjalan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan isi kebijakan, serta masih ada ketidaksesuaian yang didapat dari hasil pelaksanaan kebijakan. Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah adalah: pertama, Komunikasi: kurangnya anggaran biaya untuk melakukan sosialisasi. Kedua, Sumber Daya: terbatasnya SDM yang ahli di bidang persampahan, kurangnya fasilitas baik, TPS, TPS 3R serta kurangnya armada pengangkut sampah dan terbatasnya anggaran biaya. Ketiga, Disposisi: masih ada aparat yang melaksanakan tupoksi di luar peraturan yang ada. Keempat, Struktur Birokrasi: masih petugas/pelaksana yang menjalankan tupoksi tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.</p>
5.	<p>Tampubolon, John L. (2018)</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam dua tahapan yaitu</p>

	<p>Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang.</p> <p><i>Journal Of Public Policy And Management Review.</i> 7(2). DOI: 10.14710/jppmr.v7i2.20301</p>	<p>Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Edwards dalam Winarno (2008: 175-203) menyatakan ada empat faktor penting yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. 	<p>pengurangan sampah dan penanganan sampah. dalam pelaksanaan kedua tahapan tersebut terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang. Beberapa kegiatan pengurangan sampah belum berjalan dengan optimal seperti pembatasan timbulan, daur ulang, pemanfaatan kembali dan pengangkutan. Faktor pendukung struktur birokrasi dan disposisi. Faktor penghambat komunikasi dan sumber daya.</p>
6.	<p>Febryanti, I. Suryaningsih, M. (2018)</p> <p>Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah</p> <p><i>Journal Of Public Policy And Management Review.</i> 7(1).</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p> <p>Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Menurut Van Meter & Van Horn dalam Hamdi (2014: 99), implementasi kebijakan mencakup (<i>encompasses</i>) semua tindakan oleh perorangan atau kelompok publik dan privat yang diarahkan pada perwujudan kebijakan. 2. Menurut Riant Nugroho (2014:686-688) prinsip-prinsip dasar mewujudkan implementasi kebijakan yang efektif yaitu: Ketepatan kebijakan, Ketepatan pelaksana, 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan, terdapat permasalahan terkait sosialisasi kebijakan yang belum menyentuh seluruh masyarakat; respon masyarakat yang tidak mendukung kebijakan penanganan sampah; dan proses penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang menunjukkan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Faktor kendala kebijakan penanganan sampah adalah sumber daya dan kondisi sosial dari masyarakat Semarang.</p>

		Ketepatan target, Ketepatan lingkungan, Ketepatan proses.	
7.	<p>Novaldi, M Farhan Surya, Ayuning Budiati, dan Arenawati (2022)</p> <p>Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Margagiri Kec. Bojonegara Kab. Serang</p> <p><i>Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP)</i>. Vol 3(2). DOI: 10.30656/jdkp.v3i2.5908</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p> <p>Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Model Jan Merse Jan Merse, bahwa Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh: informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat (fisik dan non fisik), pembagian potensi. Khusus dukungan masyarakat berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksanaan program. 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Desa Margagiri belum berjalan maksimal. Terdapat hambatan dari Pemerintah Desa Margagiri. Kurangnya peran dari masyarakat.</p>
8.	<p>Ariesti, Ersi. (2021)</p> <p>Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018-2019</p> <p><i>JOM FISIP</i>. Vol. 8, Ed. 1</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p> <p>Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Model George C. Edwards, proses implementasi terdiri dari empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. 	<p>Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penanganan sampah di Kecamatan Kuantan Tengah belum terlaksana secara optimal, secara keseluruhan proses penanganan sampah membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak. Agar dampak dari penumpukan-penumpukan sampah yang terlalu lama tidak menjadikan persoalan baru bagi lingkungan</p>

9.	<p>Kosaza, Salsabila, Budi Setiyono dan Wijayanto. (2022)</p> <p>Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta</p> <p><i>Journal of Politic and Government Studies</i>. Vol. 11, No.4</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p> <p>Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Model George C. Edwards, proses implementasi terdiri dari empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. 	<p>Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa impementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di TPS Kramat Jati belum sepenuhnya berjalan dengan baik, perlu dioptimalisasikan agar lebih efektif dan efisien. Terdapat 4 faktor yang turut mempengaruhi yakni faktor sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 faktor tersebut telah dijalankan sesuai dengan teori impelementasi kebijakan publik George C. Edward III. Beberapa hambatan yang terjadi yaitu terkait luasan lahan TPS dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang baik masih kurang.</p>
10.	<p>Baskoro, Patria Adhi dan Badrudin Kurniawan (2021)</p> <p>Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo</p> <p><i>Publika</i>. Vol. 9 No 2 (149-158)</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p> <p>Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Model Van Meter dan Van Horn, meliputi: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, lingkungan sosial ekonomi dan politik. 	<p>Hasil Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah dikatakan bahwa kebijakan belum tercapai dilihat dari pengelolaan sampah yang belum mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga kualitas lingkungan menjadi kumuh. Sumberdaya manusia terbatas dan sumberdaya peralatan masih manual. Pihak organisasi formal memiliki karakter disiplin dalam kinerjanya dan informal memiliki karakter responsif dalam penanganan. Sikap para pelaksana</p>

			kebijakan mempunyai beberapa pelaksana seperti penanggungjawab kebijakan, pengawas TPST, dan tukang angkut sampah. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana berbeda mulai tingkat RT/RW jarang berkomunikasi dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk membahas permasalahan kebijakan. Kebijakan yang dilakukan antara sosial, ekonomi, dan politik masih belum seimbang karena banyak masyarakat buang sampah sembarangan, tarif retribusi kebersihan tidak sesuai dengan perda dan tidak ada perhatian khusus dari pemerintah.
11.	Okoli, Nkiruka, C., Egobueze, Anthony, & Briggs. (2020). <i>Waste Management Policy Implementation in Nigeria: a Study of Rivers State Waste Management Agency.</i> <i>International Journal of Advanced Research</i> , 8(02), 755–765.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1. <i>Environmentally Responsible Behavior</i> (ERB) Menurut Hines, Hungerford dan Tomera (1987) dalam Akintunde (2017: 123) adalah istilah khusus yang menggambarkan model perilaku lingkungan yang bertanggung jawab dengan menunjukkan variabel-variabel seperti: keinginan untuk bertindak, <i>locus of control</i> , sikap, rasa tanggung jawab pribadi, dan pengetahuan dalam mengadopsi suatu perilaku. 2. <i>Environmental Citizenship Model</i> (ECM),	Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan badan pengelolaan sampah di Rivers State tidak berjalan secara efektif, hal ini dikarenakan lembaga yang lemah, sikap manajemen yang buruk, dan pendanaan yang tidak mencukupi untuk operasional. Pihak kontraktor selaku pengelola sampah tidak melaksanakan tugas dengan baik, sehingga pengangkutan sampah seringkali mengalami keterlambatan, hal ini berdampak pada sampah berserakan di jalan bahkan masuk kedalam aliran air sungai. Selain itu

	<p>https://doi.org/10.21474/ijar01/10506</p>	<p>Menurut Hungerford dan Volk (1990) terdapat tiga tahap keterlibatan pendidikan mulai dari pengenalan hingga keterlibatan nyata, dan karakteristik pengetahuan dan sikap tertentu.</p> <p>3. Implementasi Kebijakan</p> <p>Menurut Okoli (2020) terdapat beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan publik, yaitu: lembaga yang terlibat terlalu banyak, kurangnya koordinasi atau komunikasi, keterlambatan dalam implementasi, serta kurangnya kemauan politik.</p>	<p>terdapat praktek pembuangan sampah di sembarang tempat yang dibiarkan begitu saja. Sarana dan prasarana seperti truk pengangkut sampah tidak laik jalan. Sumber daya manusia sebagai petugas kebersihan tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki keahlian bahkan tidak memperhatikan keselamatan, kesehatan, kerja.</p>
12.	<p>da Silva Leite, C. K., & De Lócco, L. G. (2020).</p> <p><i>Actors, epistemic communities and policy change: analysis of the solid waste policy in Guarulhos (SP)</i>.</p> <p><i>Ambiente e Sociedade</i>, 23, 1–20.</p> <p>https://doi.org/10.1590/1809-4422ASOC20190024R2VU2020L6AO</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p> <p>Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:</p> <p>1. Subsistem Kebijakan Publik</p> <p>Menurut Capella; Brasil (2015) bahwa subsistem sebagai dimensi yang terletak diantara makrosistem (dimensi konflik politik yang dikonfigurasi secara lebih luas) dan mikrosistem (ruang untuk konflik antara spesialis teknis), terdiri dari sejumlah actor dan institusi yang terbatas, relative kohesif satu sama lain, dengan mendedikasikan upaya untuk isu-isu spesifik dalam kebijakan.</p> <p>2. Dimensi Politik Kontekstual</p> <p>Menurut Haas (1992: 3) bahwa dalam skenario politik yang menguntungkan itu, konsultan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi kebijakan pengelolaan sampah di Guarulhos adalah proses perselisihan politik dan pembelajaran yang mempengaruhi rencana federal melalui perputaran ide dan pengalaman. Adanya ahli dari komunitas epistemic sampah yang masuk ke dalam arena politik dan administrasi membuat monopoli yang terkonfigurasi dalam permainan kekuatan politik dalam konteks kotamadya tidak seimbang. Aksi bersama para politisi, konsultan, dan manajer public berperan penting dalam memasukkan pengembangan Rencan Induk Persampahan ke dalam agenda pemerintah pada tahun 2010, sehingga menjadikan Guaruhlos sebagai</p>

		<p>mampu bertindak sebagai komunitas epistemik, yaitu sebagai actor public yang memiliki legitimasi untuk menasehati pengambil keputusan dan memikul tanggung jawab yang didelegasikan, memobilisasi keyakinan kausal, nilai, gagasan validitas pengetahuan dan teknik dalam manajemen publik.</p> <p>3. Studi Difusi dan Sirkulasi, Menurut Porto de Oliveira dan Pimenta de Faria (2017) bahwa studi difusi dan sirkulasi didedikasikan untuk menganalisis proses perpindahan gagasan yang luas dan lancar tentang kebijakan publik, dengan perbedaan bahwa difusi melibatkan dinamika politik lintas negara, wilayah, dan kota.</p> <p>4. Proses Perubahan Menurut Kingdon (2011) bahwa dalam proses perubahan dimungkinkan ada Tindakan aktor politik yang membuat perbedaan.</p>	<p>kotamadya pertama yang menyampaikan rencana pengelolaan sampah ke Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2011.</p>
13.	<p>Johansson, N., & Corvellec, H. (2018).</p> <p><i>Waste policies gone soft: An analysis of European and Swedish waste prevention plans.</i></p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p> <p>Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:</p> <p>1. Proses Kebijakan</p> <p>1. Menurut Jann dan Wegrich (2007) terdiri dari lima bagian, yaitu: pengaturan agenda, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi.</p>	<p>Hasil penelitian ini didapatkan bahwa rencana tindakan pencegahan limbah bertujuan untuk mengatasi faktor yang mendasari tumbuhnya limbah konsumsi serta meningkatkan penanganan limbah pada sumbernya. Penanganan limbah pada tingkat daerah dan nasional lebih banyak menangani limbah kecil. Namun rencana penanganan limbah terdapat ketidakjelasan</p>

	<p><i>Waste Management</i>, 77(6), 322–332. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.04.015</p>	<p>2. Menurut Hill (1997) proses kebijakan cenderung berantakan, melibatkan sejumlah actor formal dan informal, dan memerlukan banyak redefinisi sarana dan tujuan, rencana kebijakan, ambisi, prioritas, dan tindakan yang ditekankan oleh pembuat keputusan.</p> <p>3. Teori Komisi Eropa (2008:18), tujuan akhir dari pencegahan limbah rencananya adalah untuk memutuskan “hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan dampak lingkungan”. Secara teoritis, fokus pencegahan sampah kebijakan dengan demikian melemahkan hubungan antara penyebab (pertumbuhan ekonomi) dan efek (pembentukan sampah), bukan pendorong di balik timbulan sampah.</p> <p>2. Rencana Kebijakan Menurut Jann dan Wegrich (2007), terdiri dari pengaturan agenda, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi.</p> <p>3. Tantangan dalam Rencana Menurut Wolman (1981) yaitu tujuan dan ukuran, efektivitas desain rencana, struktur administrasi, dan aktor yang terlibat, serta rezim kebijakan.</p>	<p>dalam hal insentif dan sanksi, Sebagian besar penanganan justru dipercayakan kepada pasar daripada dikendalikan melalui perencanaan. Sehingga terjadi kesamaan dalam pencegahan limbah dalam hal perencanaan yang pada akhirnya dapat mengalami ketidak efektifan.</p>
14.	Muhamad Azahar Abas, & Wee, S. T. (2016).	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian ini didapatkan bahwa promosi tata kelola <i>multi-stakeholder</i>

	<p><i>Sustainable Solid Waste Management in Malaysia: The Concept of Multi-Stakeholder Governance in Solid Waste Policy Implementation.</i></p> <p><i>Public Policy & Administration Research</i>, 4(10), 26–36. file:///C:/Users/linds/Downloads/16417-18910-1-PB-libre.pdf</p>	<p>Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Kelola Pemerintahan <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Andre (2008) tata kelola adalah sebuah konsep untuk menggambarkan seberapa baik suatu organisasi mengendalikan tindakannya untuk memastikan bahwa konstituennya mengikuti kebijakan yang ditetapkan. 2. Menurut Thomas dan Grindle (1990) praktik tata kelola model <i>multi-stakeholder</i> memberikan bentuk kerjasama baru yang memungkinkan beragam pemangku kepentingan bekerjasama untuk mencapai tujuan kebijakan. Lebih lanjut, tata kelola <i>multi-stakeholder</i> memiliki empat elemen penting seperti partisipasi, keterbukaan, kerjasama serta kolaborasi dan pluralisme. 2. Pemangku Kepentingan Pengelolaan Sampah <p>Menurut Bank Dunia (1995) pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu pemangku kepentingan primer, sekunder dan tersier. Pemangku kepentingan utama mengacu pada orang-orang yang bertanggung jawab untuk pengembangan kebijakan, penegakan dan implementasi. Pihak swasta yang ikut serta dalam implementasi kebijakan baik secara formal</p> 	<p>melalui partisipasi dan kolaborasi pemangku kepentingan terkait dalam implementasi kebijakan sangat penting untuk memastikan kebijakan dapat diterapkan lebih efektif di lapangan. Selain itu, keterbukaan dan pluralisme kebijakan sangat penting untuk memastikan warga sipil memahami dengan jelas tujuan kebijakan. Kenyataannya, untuk mendapatkan 100% komitmen pemangku kepentingan selama implementasi kebijakan di lapangan cukup sulit dicapai. Oleh karena itu, studi lebih lanjut mengenai komitmen pemangku kepentingan terhadap kebijakan pengelolaan limbah padat di Malaysia sangat diperlukan. Selain itu, kajian ekstensif mengenai mekanisme penegakan yang efektif dalam implementasi kebijakan persampahan sangat penting untuk digali berdasarkan kesesuaian pemangku kepentingan di masa mendatang.</p>
--	---	--	---

		<p>maupun informal disebut sebagai <i>secondary stakeholders</i>. Selain itu, pemangku kepentingan tersier mengacu pada orang-orang yang mematuhi hukum atau kebijakan.</p>	
15.	<p>Tan, Z., Ren, Y., Han, J., & Chen, S. (2021).</p> <p><i>Evolving pattern and improvement path of China's solid waste management policies.</i></p> <p><i>Chinese Journal of Population, Resources and Environment</i>, 19(4), 358–368. https://doi.org/10.1016/j.cjpre.2022.01.009</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p> <p>Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Teks Kebijakan <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Tan (2021) merupakan metode penelitian dasar untuk memahami filosofi, kerangka konseptual, orientasi kebijakan, dan implementasi kebijakan pengelolaan persampahan. Pada tataran teoretis, kajian sistematis teks kebijakan pengelolaan persampahan cukup kondusif untuk memperjelas landasan teoretis kebijakan berdasarkan pemahaman situasi dan tren kebijakan saat ini dan memperkuat penelitian teoritis perbatasan kebijakan pengelolaan persampahan. dengan cara berwawasan ke depan. 2. Ran (2017) memanfaatkan analisis isi dan analisis wacana kritis dalam menganalisis teks kebijakan tata kelola hijau dari tahun 1978 hingga 2016, dan memilah tahapan perkembangan, karakteristik zaman, dan 	<p>Hasil penelitian ini didapatkan bahwa kebijakan pengelolaan persampahan telah menunjukkan berbagai tingkat efektivitas dan berbagai jenis teks, dan sistem kerangka kebijakan dipotimalkan secara bertahap. Dalam setiap rangkaian kebijakan pengelolaan sampah, isu-isu penting disorot dengan menyesuaikan perkembangan jaman. Dimana kebijakan tersebut mencakup lebih banyak bidang, isisnya lebih terarah, dan komprehensif, serta implementasinya lebih spesifik dan praktis. Kebijakan tersebut fokus pada keamanan, pengurangan, reklamasi, pencegahan pencemaran, pengawasan dan pengelolaan, pencemaran sekunder, daur ulang, ekonomi sirkular, dll. Pemerintah memperkuat desain tingkat atas dari tingkat makro, dengan fokus pada pedoman dan standarisasi kebijakan, koordinasi kebijakan, dukungan teknis, dan peningkatan tata kelola untuk mendorong realisasi tujuan (aman, pengurangan, reklamasi). Diversifikasi alat, pendekatan</p>

		<p>logika perubahan kebijakan tata kelola hijau Tiongkok.</p> <p>3. Yao dan Zhang (2018) mengurutkan 172 teks kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan menggunakan analisis jejaring sosial dan analisis kata bersama untuk mengkarakterisasi pola evolusi, karakteristik dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan industri daur ulang sumber daya dalam empat dimensi</p>	<p>dan faktor pendukung pengelolaan persampahan, dan meningkatnya kesadaran akan dukungan teknis pengelolaan persampahan, serta mode pengelolaan dan jalur tata kelola telah memasuki fase transformasi adaptif.</p>
16.	<p>Yang, Q., He, L., Liu, X., & Cheng, M. (2018).</p> <p><i>Bayesian-based conflict conversion path discovery for waste management policy implementation in China.</i></p> <p><i>International Journal of Conflict Management</i>, 29(3), 347–375. https://doi.org/10.1108/IJ-CMA-09-2017-0109</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p> <p>Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:</p> <p>1. Komposisi Limbah Padat Perkotaan</p> <p>1. Menurut Su, dkk (2014) komposisi dan variasi sampah disebabkan oleh: tingkat industrialisasi dan pendapatan, kebiasaan konsumsi, peraturan lingkungan, kebijakan energi, kelayakan teknologi, kesadaran lingkungan oleh masyarakat.</p> <p>2. Menurut Zhang, dkk (2010) pada umumnya sampah perkotaan terdiri dari tiga kelompok bahan: organik, anorganik, dan sampah daur ulang.</p>	<p>Hasil penelitian ini didapatkan bahwa implementasi kebijakan penegelolaan sampah di China termasuk dalam implementasi simbolik dengan ambiguitas dan konflik tinggi. Empat jalur konversi dasar untuk kebijakan pengelolaan sampah diusulkan yang diklasifikasikan berdasarkan durasi dan stabilitas. Kemudian, dimungkinkan setiap daerah untuk terlibat dan menemukan faktor, jalur dan jenis implementasi kebijakan yang tepat melalui proses analisis kebijakan. Efektivitas kebijakan yang dirasakan memainkan peran penting. Kondisi penduduk memiliki dampak positif, yang dapat ditingkatkan melalui pembangunan ekonomi Cina. Pengaruh norma subjektif terhadap pengelolaan sampah tidak</p>

			signifikan. Namun norma subjektif memiliki potensi terobosan untuk mengatasi stagnasi kebijakan klasifikasi sampah. Namun, dampak dari masing-masing faktor tersebut dapat berubah seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan inovasi teknologi.
17.	<p>Oliveira, T. De. (2021). <i>Lean waste analysis in light of principles of public administration: a study of an IFES academic project submission process.</i> 28(3), 1–18.</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p> <p>Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Publik <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Pereira (2010) bahwa administrasi publik dapat dilihat dari prespektif formal, material dan operasional. Perspektif formal adalah seperangkat entitas yang melaksanakan kebijakan pemerintah; perspektif material mempertimbangkan fungsi publik; dan perspektif operasional memuat aspek terkait kinerja, serta prosedur hukum dan teknis pelayanan negara atau pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya. 2. Menurut Gasparini (2012), administrasi publik tidak hanya harus mematuhi hukum, tetapi juga moralitas itu sendiri, karena tidak semua yang legal itu jujur. 3. Menurut Mello (2011), administrasi publik harus berjalan dengan jujur dan dengan itikad 	<p>Hasil penelitian ini didapatkan bahwa proses pengelolaan limbah dapat membahayakan prinsip-prinsip administrasi publik, mengekspos kemacetan dan kepatuhan dengan PPA dalam melaksanakan proses. Analisis limbah berdasarkan PPA efisien dalam mengidentifikasi masalah proses publik, yang berarti praktik dan proyek sektor publik dapat direncanakan dengan lebih baik dan menargetkan perbaikan yang sejalan dengan PPA yang memandu administrasi publik Brasil.</p>

		<p>baik, serta dilarang melakukan tindakan yang merusak prinsip-prinsipnya dan menghalangi warga negara untuk menggunakan haknya. Hal ini menjadikan asas legalitas sebagai landasan bagi asas-asas lainnya, meskipun tidak ada hierarki di antara mereka, karena membatasi semua tindakan administratif pada undang-undang, baik yang terkait maupun diskresioner (Gasparini, 2012).</p> <p>2. Konsep Lean Konsep lean, yang diturunkan dari TPS, dicirikan sebagai metode empiris yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pekerja dengan penekanan kuat pada pelatihan, berdasarkan peningkatan berkelanjutan, juga dikenal sebagai <i>kaizen</i> (Liker, 2007; Bekasi, 2012; Oh, 2015).</p>	
18.	<p>Jerin et.al (2022)</p> <p>An overview of progress towards implementation of solid waste management policies in Dhaka, Bangladesh.</p> <p><i>Heliyon</i>. Vol 8, No 2</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan multi metode dengan mengkaji 24 dokumen kebijakan/strategi; Analisis kesenjangan implementasi dengan desk review yang ekstensif dan data yang diperoleh dari pendekatan kualitatif dan lokakarya produksi bersama. Ini memungkinkan penelitian ini untuk menangkap skenario multidimensi dan komprehensif dari pengelolaan sampah di kota Dhaka.</p>	<p>Studi menemukan bahwa beberapa rencana aksi telah diperkenalkan namun tidak semuanya memiliki implementasi yang tepat seperti mematuhi praktik pemilahan sampah dan daur ulang dari rumah tangga ke tingkat TPA. Kurangnya pemantauan dan koordinasi di antara lembaga pelaksana kebijakan yang ada telah muncul sebagai kekhawatiran yang signifikan di Bangladesh.</p>

19.	<p>Kumar, Sunil (2017)</p> <p><i>Challenges and opportunities associated with waste management in India</i></p> <p>Royal Society Open Science. Vol 4 (3)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada masalah besar yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kurangnya tanggung jawab terhadap sampah di masyarakat. India menghadapi tantangan terkait kebijakan limbah, pemilihan teknologi limbah, dan ketersediaan orang yang terlatih dengan tepat di sektor pengelolaan limbah. Hingga persyaratan mendasar ini terpenuhi, India akan terus menderita akibat pengelolaan limbah yang buruk dan dampak terkait terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.</p>
20.	<p>Saei, Hedaiatullah</p> <p><i>Application of Public Private Partnership in Sustainable Solid Waste Management, Case of Delhi and Manila Metropolises</i></p>	<p>Pendekatan kualitatif yang melibatkan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer yang diperlukan, sedangkan referensi literatur yang relevan memberi saya data sekunder yang sangat dibutuhkan. Kerangka teoritis dikembangkan dengan menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan dan teori keadilan Sosial/Lingkungan. Teori-teori tersebut telah digunakan sebagai dasar untuk membandingkan praktik pengelolaan persampahan teoretis dan aktual saat menganalisis sistem persampahan di kedua kota tersebut.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, semakin memburuknya lingkungan akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi yang cepat dan pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali telah menantang kapasitas sektor publik untuk bekerja sesuai dengan harapan masyarakat. Kedua, sektor swasta diyakini memiliki sumber daya, teknologi, kapasitas, efisiensi dan keahlian yang dibutuhkan untuk pengelolaan limbah padat yang lebih efektif, sedangkan sektor publik dapat memainkan peran penting dalam membuat peraturan dan mempertahankan</p>

			kewenangan pengawasan terhadap kontraktor sektor swasta
21.	<p>Setyawati, D.A., dan Purnaweni, H. (2018)</p> <p>Implementasi Kebijakan Kerjasama Pemerintah dengan swasta (public private partnership) dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang.</p> <p>Journal Of Public Policy And Management Review, 7(4).</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p> <p>Implementasi Kebijakan Publik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardjo dalam Pasolong (2011: 57), mengatakan bahwa implemen- tasi adalah proses mentransformasi- kan suatu rencana ke dalam praktek. 2. Menurut Van Meter & Van Horn dalam Hamdi (2014: 99), implementasi kebijakan mencakup (encompasses) semua tindakan oleh perorangan atau kelompok publik dan privat yang diarahkan pada perwujudan kebijakan. 3. Menurut Riant Nugroho (2014:686-688) prinsip-prinsip dasar mewujud- kan implementasi kebijakan yang efektif yaitu: Ketepatan kebijakan, Ketepatan pelaksana, Ketepatan target, Ketepatan lingkungan, Ketepatan proses 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kemitraan ini belum tepat maupun proses kebijakannya. Hubungan Kantor Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan PT. Narpati kurang berjalan mulus karena PT. Narpati tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar iuran.</p>

1.6.2. Administrasi Publik

Berikut merupakan definisi administrasi publik menurut beberapa ahli dalam (Chakrabarty & Chand, 2012: 2 - 3):

1. Menurut Dimock dan Dimock (1969: 3, 11) administrasi publik dalam memecahkan masalah dan mencapai tujuan harus dilakukan secara praktis, eksplorasi dan inovatif dengan menggunakan metode yang lebih baik melalui pemahaman terhadap permasalahan dalam suatu kelompok.
2. Menurut Woodrow Wilson (1953: 65-75) administrasi publik adalah sebuah pelaksanaan aturan publik yang terperinci dan sistematis. Setiap penerapan aturan tertentu adalah tindakan administrasi.
3. Menurut Pfiffner dan Presthus (1953: 3) administrasi publik berkaitan dengan sarana untuk menerapkan nilai-nilai politik, sebagai usaha individu dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan publik.
4. Menurut Nigro (1965, 1971: 21) administrasi publik adalah suatu usaha kelompok yang kooperatif di lingkungan publik; administrasi publik meliputi tiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta keterkaitan hubungan ketiganya; administrasi publik memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan publik dan menjadi bagian dari proses politik; administrasi publik berbeda secara signifikan dengan administrasi swasta; dan administrasi publik berhubungan erat dengan berbagai kelompok dan individu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan definisi administrasi publik di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh individu atau lembaga

dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan secara praktis, eksplorasi, dan inovatif dengan memperhatikan kebutuhan dan permasalahan yang ada sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien.

1.6.3. Paradigma Administrasi Publik

Paradigma adalah cara pandang yang menjadi dasar dalam seseorang untuk berpikir. Ilmu pengetahuan yang berkembang harus dapat diterima secara umum, namun seiring dengan berjalannya waktu dapat mengalami perubahan. Ilmu Administrasi Publik dalam perkembangannya sering kali mengalami pergeseran paradigma ditandai dengan pergeseran lokus dan fokus ilmu administrasi publik yang menunjukkan disiplin ilmu tersebut mengalami perkembangan. Perkembangan paradigma administrasi publik menurut Nicholas Henry dalam (Ikeanyibe et al., 2017: 3-6) terdiri atas:

1. Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Paradigma dikotomi politik dan administrasi adalah gagasan yang memisahkan fungsi politik dan administrasi pemerintahan sebagai strategi untuk mendorong efisiensi dan efektivitas. Goodnow dalam (Keban, 2014: 32) mengungkapkan bahwa politik harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedang administrasi memberi perhatiannya pada pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau kehendak tersebut. Implikasi dari paradigma tersebut adalah bahwa administrasi harus dilihat sebagai suatu yang bebas nilai, dan diarahkan untuk mencapai nilai efisiensi dan ekonomi dari *government bureaucracy*. Woodrow Wilson menjadi pelopor dalam paradigma ini dengan menyatakan empat

persyaratan administrasi publik yang efektif, yaitu, (1) pemisahan politik dan administrasi; (2) analisis komparatif organisasi politik dan swasta; (3) meningkatkan efisiensi dengan praktik dan sikap seperti bisnis terhadap operasi sehari-hari; dan (4) meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui manajemen dan pelatihan pegawai negeri, serta mendorong penilaian berbasis prestasi.

Lebih lanjut, Henry mengatakan, untuk memperkuat perbedaan gagasan dikotomi politik dan administrasi dapat dilakukan dengan menghubungkannya dengan dikotomi nilai dan fakta yang sesuai. Sehingga segala sesuai yang diteliti oleh administrasi publik di bidang eksekutif dipenuhi dengan warna dan legitimasi yang factual dan ilmiah, sementara studi tentang pembuatan kebijakan publik dan hal-hal lain yang terkait diserahkan kepada ahli politik.

Dalam paradigma ke-1 hanya menekankan pada aspek lokusnya saja yaitu *government bureaucracy*, akan tetapi fokus pada paradigma ini tidak dijelaskan secara rinci.

2. Paradigma 2: Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)

Paradigma prinsip-prinsip administrasi merupakan perkembangan yang berorientasi pada manajemen melalui peningkatan administrasi publik. Fokus pada paradigma ini yaitu keahlian dalam bentuk prinsip-prinsip administrasi. Sedangkan lokusnya dapat berlaku dimana pun karena prinsip tetap prinsip dan administrasi tetap administrasi (Muhammad, 2019: 44-45).

Dalam paradigma ini terdapat keyakinan adanya prinsip-prinsip administrasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas pemerintahan. Gulick dan Urwick memperkenalkan tujuh prinsip administrasi yang disebut sebagai POSDCROB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting*).

3. Paradigma 3: Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Dalam paradigma administrasi publik sebagai ilmu politik terjadi pertentangan terhadap disiplin ilmu administrasi publik. Pada periode yang sama, ada upaya dari para ahli manajemen untuk mengklaim disiplin administrasi publik. Pada periode ini (Basheka, 2012: 43) menggambarkan sebagai era kekosongan dikotomi dan menusuk prinsip-prinsip. Pemisahan administrasi dan politik tidak mungkin terjadi pada pemerintahan. Gaus mengatakan bahwa teori administrasi publik sama dengan teori politik. Sementara Herbert A. Simons melalui karyanya *Administrative Behavior: A Study of Decision-making Processes in Administrative Organization* yang berisi kritik terhadap prinsip-prinsip tersebut tidak berlaku secara universal. Hasilnya adalah diperbaharainya kembali lokus, yaitu birokrasi pemerintah, akan tetapi pada paradigma ini kehilangan fokusnya yaitu prinsip-prinsip administrasi publik.

Administrasi publik pada perkembangannya hanya didefinisikan sebagai suatu penekanan atau *area of interest* atau sebagai persamaan dari ilmu politik. Pendekatan tersebut terus menekankan pada pendekatan birokrasi, yang mengarah pada birokrasi berlebihan dan difusi administrasi publik hampir di setiap aspek pemerintahan mulai dari penentuan kebijakan hingga implementasi.

4. Paradigma 4: Administrasi Publik sebagai Manajemen (1956-1970)

Dalam paradigma ini prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi dan sebagainya merupakan fokus dari paradigma ini. Fokus yang dikembangkan pada paradigma ke 4 diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya dalam dunia bisnis tetapi juga dalam dunia administrasi publik, sehingga lokusnya menjadi tidak jelas (Keban, 2014: 33).

5. Paradigma 5: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-sekarang)

Pada tahap ini terdapat upaya untuk membangun kembali administrasi publik sebagai studi yang otonom. Fokus administrasi publik berada pada hierarki, birokrasi dialihkan ke pasar dan organisasi sektor swasta. Dapat dikatakan bahwa terjadi perpindahan dari model administrasi publik konvensional ke model NPM (New Public Management).

NPM muncul untuk menghadapi masalah yang sama yaitu inefisiensi dalam sistem administrasi. Administrasi publik tradisional atau konvensional menganggap pemerintah sebagai aktor yang otonom dan otoritatif melalui struktur dan proses birokrasi, hierarkis, dan proses pemberian layanan publik. Paradigma tersebut memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus administrasi publik dalam paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik; sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik.

6. Paradigma 6: *Governance* (1990-sekarang)

Berkembangnya jaman dapat melahirkan perkembangan ilmu pengetahuan baru sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang terjadi pada masa lalu atau memperbaiki ilmu pengetahuan yang sudah ada. Paradigma administrasi publik terus mengalami perubahan hingga melahirkan paradigma baru yaitu *Governance* atau *New Public Service*.

Dalam pendekatan *governance* lebih berorientasi pada partisipasi dan kerjasama dengan berbagai jaringan aktor. Pada hakekatnya pemerintah melibatkan kemitraan seperti: masyarakat; LSM; sektor publik dan sektor swasta dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Pemerintah mengatur melalui kolaborasi hierarki birokrasi dan jaringan aktor untuk mencapai efisiensi dan nilai-nilai penting lainnya. Oleh karena itu, istilah *governance* digunakan untuk menggambarkan proses fundamental pada pemerintahan modern yang berbeda dengan jalannya pemerintahan tradisional.

Berdasarkan penjelasan paradigma administrasi publik di atas, penelitian ini mengarah pada Paradigma ke-5: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Dalam paradigma ke-5 telah memiliki fokus dan lokus yang jelas yaitu kebijakan publik. Fokus administrasi publik dalam penelitian ini yaitu melihat pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Wonosobo. Sehingga dapat menemukan faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sampah yang nantinya dapat diberikan rekomendasi yang tepat untuk mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Wonosobo.

1.6.4. Kebijakan Publik

Pembahasan mengenai kebijakan public tidak bisa dilepaskan dari pengertian kebijak itu sendiri. Kebijakan dapat menciptakan struktur yang lebih teratur dan terarah. Beberapa definsi kebijakan publik menurut ahli dalam (Chakrabarty & Chand, 2012: 183) sebagai berikut.

1. Menurut Robert Presthus (1975: 14) dalam mendefinisikan kebijakan sebagai pilihan yang dibuat oleh individu atau kelompok individu yang menjelaskan, membenarkan, mengarahkkan, atau menguraikan tindakan tertentu. Kebijakan publik tersebut terdiri dari semua program yang dirancang untuk diimplementasikan dengan membentuk organisasi, badan publik, dan biro, sehingga dapat memberikan panduan penerapan atau praktek kebijakan publik secara keseluruhan. Ketika hubungan antara masyarakat dan berbagai lembaga publik menjadi lebih kompleks dan saling bergantung, maka kebutuhan akan penilaian terhadap mengapa dan bagaimana kebijakan tersebut dilakukan oleh pemerintah menjadi lebih komprehensif.
2. Thomas R. Dye dalam (Peters, 1996: 4) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.
3. Menurut James E. Anderson (1975: 3) mendefiniskan kebijakan publik sebagai tindakan bertujuan yang diikuti oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam menanagani masalah yang menjadi perhatian.

4. Yhezkel Dor (1974: 12) mendefinisikan pembuatan kebijakan publik sebagai proses dinamis yang memutuskan pedoman utama untuk melaksanakan tindakan yang diarahkan ke masa depan oleh pemerintah. Pedoman kebijakan ini bertujuan untuk mencapai apa yang menjadi kepentingan publik dengan cara terbaik.

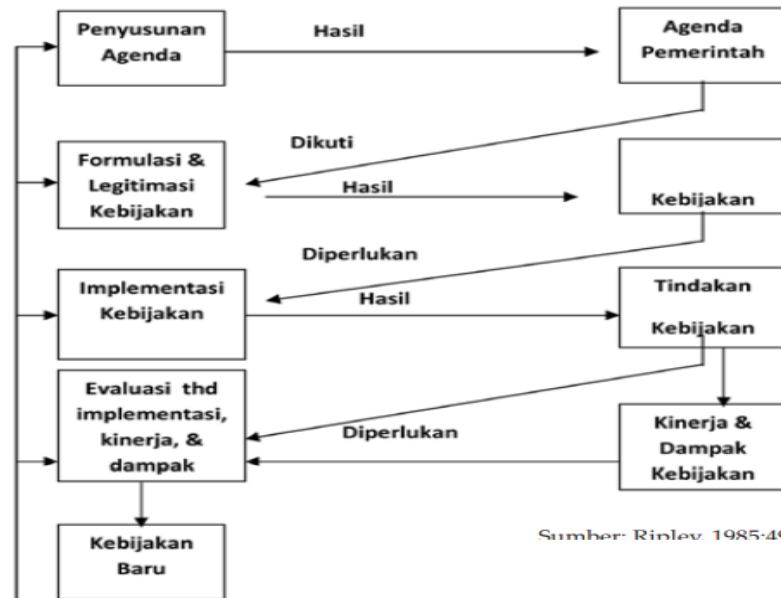
Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan bersifat intelektual yang didalamnya terdapat unsur politis. Aktivitas politis tersebut didalamnya terdapat penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Ripley (1985) dalam (Taufiqurokhman, 2014: 18) memberikan pandangannya terhadap tahapan kebijakan publik yang digambarkan sebagai berikut:

Dalam penyusunan agenda kebijakan terdapat tiga kegiatan yang dilakukan: (1) membangun persepsi di kalangan *stakeholders* terhadap fenomena yang menjadi masalah; (2) membuat batasan masalah; (3) memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah.

Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Pada tahap ini perlu dukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi

suatu kebijakan berjalan dengan baik. Tahap implementasi kebijakan menjadi tahap penting karena tahapan ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan.



Gambar 1.3. Tahapan Kebijakan Publik
 Sumber: Ripley (1985: 49) dalam (Taufiqurokhman, 2014)

Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan. Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan lebih berhasil.

Berdasarkan definisi kebijakan publik dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diadopsi dan ditempuh oleh pemerintah dengan dilandasi oleh hukum untuk melayani kepentingan publik. Maka dari itu, dengan melihat tahapan kebijakan, penelitian ini akan meninjau implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah khususnya pada pasal 13 yang menjelaskan mengenai proses penanganan sampah,

meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

1.6.5. Implementasi Kebijakan Publik

1.6.5.1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan salah satu proses tindak lanjut dalam pembuatan kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan dapat diterima oleh masyarakat dan mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga dapat ditemukan kelebihan dan kelemahan dari proses pengambilan keputusan.

Dalam *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*, implementasi kebijakan merupakan tahap politik, karena adanya persaingan antara lembaga pemerintah untuk mendapatkan sumber daya publik yang besar, adanya kelompok masyarakat yang teroganisir untuk mempengaruhi kebijakan, dan ketertarikan politisi dengan apa yang terjadi dalam implementasi kebijakan (Farazmand, 2020: 621).

Ripley dan Franklin dalam (Winarno, 2008) mengatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno, 2008) membatasi implementasi kebijakan sebagai suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Berdasarkan definisi implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan atau pengimplementasian suatu kebijakan yang telah dibuat dimana didalamnya membutuhkan sumber daya untuk mencapai tujuan kebijakan.

1.6.5.2. Ketepatan Implementasi Kebijakan Publik

Dalam implementasi kebijakan hal yang terpenting adalah dengan menampilkan keefektifitasan pelaksanaan kebijakan. Pada dasarnya terdapat lima tepat dalam hal keefektifan implementasi kebijakan menurut (Nugroho, 2021: 51-53) sebagai berikut:

1. Ketepatan kebijakan. Dalam hal ini penilaian ketepatan kebijakan dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut dapat memecahkan masalah yang akan dipecahkan. Apakah kebijakan sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang akan dipecahkan. Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang berwenang.
2. Ketepatan pelaksana. Aktor yang terlibat dalam implementasi tidak hanya pemerintah, terdapat tiga lembaga pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat atau swasta dan implementasi kebijakan yang diswastakan.
3. Ketepatan target implementasi. Ketepatan target berkenaan dengan tiga hal, yaitu:
 - a. Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi yang lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain;

- b. Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak, kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak;
 - c. Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya.
4. Ketepatan lingkungan implementasi. Terdapat dua lingkungan yang menentukan, yaitu:
- a. Lingkungan kebijakan, merupakan interaksi diantara lembaga perumus kebijakan, pelaksana kebijakan dan lembaga lain yang terkait. Donald J. Calista dalam (Nugroho. 2021: 52-53) menyebutkan sebagai variabel *authoritative arrangement* yang berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan, *network composition* yang berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat dengan kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, dan *implementation setting* yang berkenaan dengan posisi tawar menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dengan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan.
 - b. Lingkungan eksternal kebijakan yang disebut Calista dalam (Nugroho, 2021: 53) terdiri dari atas *public opinion* yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, dan *individuals* yakni individu-individu tertentu yang

mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

5. Tepat proses. Implementasi kebijakan publik terdiri dari tiga proses, yaitu:
 - a. *policy acceptance*, publik memahami kebijakan sebagai sebuah aturan yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan;
 - b. *policy adoption*, publik menerima kebijakan sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan;
 - c. *strategic readiness*, publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat pelaksana siap menjadi pelaksana kebijakan.

1.6.5.3. Model Implementasi Kebijakan Publik

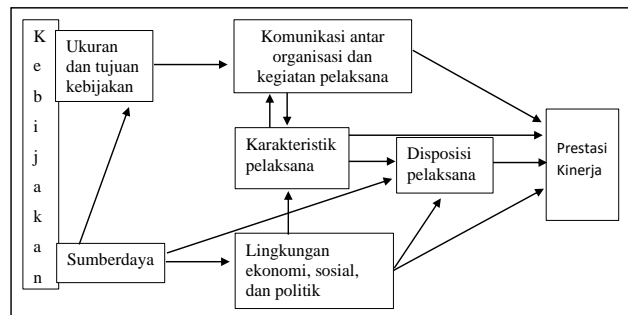
Implementasi kebijakan menjadi sebuah proses penting dalam pelaksanaan kebijakan. Beberapa permasalahan yang tidak direncanakan dapat muncul di lapangan, serta ancaman konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan. Sebagai upaya untuk mengetahui proses implementasi, maka digunakan model implementasi kebijakan. Beberapa model implementasi kebijakan menurut ahli dalam (Syahrudin, 2018: 42-64):

1. Model Van Meter dan Van Horn

Model ini mengandaikan implementasi kebijakan berjalan linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik dalam model ini adalah:

- a. Standar dan sasaran kebijakan. Setiap kebijakan harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan jelas dan terstruktur dengan ketentuan dapat terwujud. Apabila standar dan tujuan kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.
- b. Sumber daya. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia adalah sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu proses implementasi. Ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu minim, maka kinerja kebijakan publik tidak optimal.
- c. Hubungan antar organisasi. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlonat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi akan dipengaruhi oleh corak para agen pelaksana.
- d. Karakteristik agen pelaksana/implementor. Semakin baik koordinasi dan arus komunikasi di antara piha-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, maka semakin kecil kemungkinan akan terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan konflik.
- e. Kecenderungan (disposisi) implementor. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana sangatlah mempengaruhi berhasil dan tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

- f. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Pada bagian ini, perlu menjadi perhatian dalam menilai kinerja implementasi kebijakan publik, sejauhmana lingkungan sosial, politik, dan ekonomi mendorong terciptanya keberhasilan kebijakan publik sesuai yang telah ditetapkan.



Gambar 1.1. Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn

Sumber: Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Syahrudin (2018)

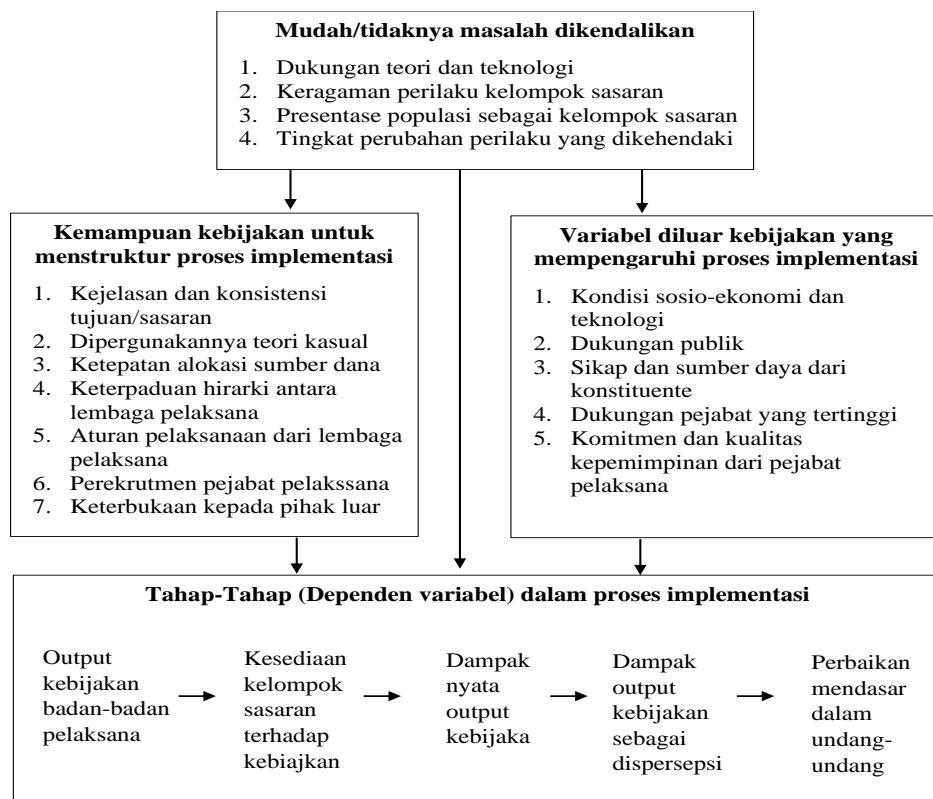
2. Model Mazmanian dan Sabatier

Model ini disebut sebagai Analisis Implementasi (*A Framework for Implementation Analysis*). Mazmanian dan Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel:

- a. Karakteristik Masalah. Mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, perilaku kelompok sasaran, presentase kelompok sasaran, dan perubahan perilaku seperti apa yang dikehendaki.
- b. Karakteristik Kebijakan. Meliputi variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan

keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen serta kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

c. Lingkungan Kebijakan. Tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

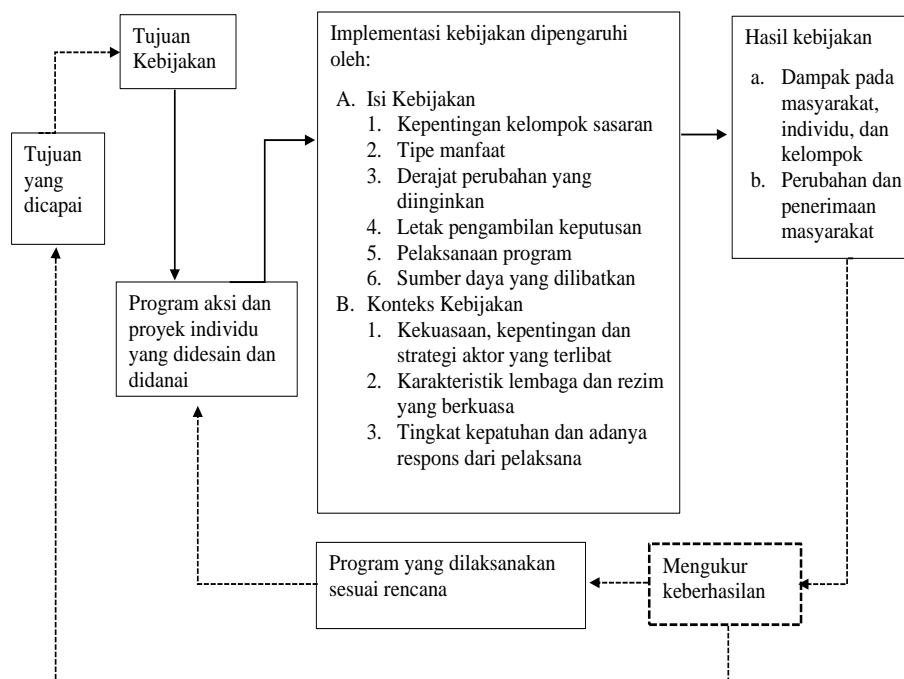


Gambar 1.2. Varaibel-variabel yang Mempengaruhi Proses Implementasi
Sumber: Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Syahrudin (2018)

3. Model Grindle

Model ini *ditentukan* oleh isi dari kebijakan (*content of policy*) dan konteks dari implementasinya (*context of implementation*). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Grindle mengemukakan bahwa pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari:

- a. Dalam proses, dapat dilihat dari kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan merujuk pada aksi kebijakan.
- b. Tujuan kebijakan yang dicapai dengan melihat dua faktor, yaitu: dampak terhadap masyarakat secara individu atau kelompok dan tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran.



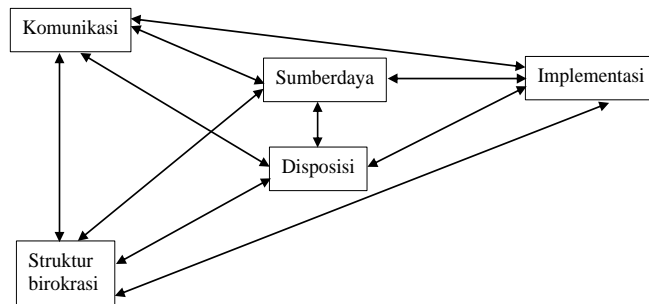
Gambar 1.3. Model Implementasi Sebagai Politik dan Administrasi

Sumber: Grindle (1980: 11) dalam Syahrudin (2018)

4. Model Edwards III

Edwards III melihat empat isu pokok yang perlu mendapat perhatian agar implementasi kebijakan menjadi efektif:

- a. Komunikasi, sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan. Implementasi dapat tercapai secara efektif apabila adanya tanggapan dan pemahaman dari pembuat keputusan. Ketersediaan sumber daya merupakan hal penting dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik.
- b. Sumber daya, komponen sumber daya meliputi jumlah staff, keahlian pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber dalam pelaksanaan kebijakan, adanya kewenangan, serta adanya fasilitas pendukung.
- c. Disposisi, para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan, akan tetapi harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Hal ini berkaitan dengan sikap implementor, antara lain: kesadaran pelaksana, petunjuk pelaksana, dan intensitas respon tersebut.
- d. Struktur birokrasi, birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi dengan baik. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif, dapat menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.



Gambar 1.4. Model Implementasi Kebijakan Edward III
 Sumber: *Edwards III (1980: 148) dalam Syahrudin (2018)*

1.6.6. Sampah

1.6.6.1. Pengertian Sampah

Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak memiliki nilai dan harus dikelola kembali agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan tidak mengganggu pembangunan (SNI 19-2454-2002, 2002: 2).

Menurut Soewondo (1983) dalam (Riduan, 2021: 31) berpendapat bahwa sampah adalah bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, pada umumnya berasal dari kegiatan manusia (termasuk kegiatan industri), dan tidak termasuk kegiatan biologis.

Dari definisi sampah di atas dapat disimpulkan bahwa sampah adalah barang hasil buangan masyarakat ataupun industri yang tidak memiliki nilai guna, baik berbentuk padat atau semi-padat dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

1.6.6.2. Sumber Sampah

Timbulan sampah yang ada di lingkungan sekitar dapat berasal dari beberapa sumber menurut (Wahyono & Sudarno, 2012: 8), yaitu:

1. Pemukiman penduduk

Sampah pemukiman biasanya dihasilkan oleh masyarakat yang tinggal di desa atau kota. Sampah yang dihasilkan berupa sisa makanan dan bahan sisa proses pengolahan makanan atau sampah basah (*garbage*), sampah kering (*rubbish*), perabotan rumah tangga, dan tumbuhan.

2. Tempat umum dan tempat perdagangan

Tempat umum merupakan tempat dimana orang berkumpul atau melakukan aktivitas termasuk tempat perdagangan. Sampah yang dapat ditemukan ditempat umum berupa sisa makanan (*garbage*), sampah kering, abu sisa pembakaran, sisa bangunan, sampah khusus dan sampah berbahaya.

3. Industri berat dan ringan

Kegiatan industri seperti industri makanan dan minuman, industri kayu, industri kimia, industri logam, dan kegiatan industri lainnya dapat menghasilkan sampah basah, sampah kering, sisa-sisa bangunan, sampah khusus dan sampah berbahaya.

4. Pertanian

Lokasi pertanian seperti kebun, ladang atau sawah dapat menghasilkan sampah berupa bahan-bahan makanan yang telah membusuk, pupuk, bahan pembasmi hama, dan tanaman dan binatang yang telah mati.

1.6.6.3. Jenis dan Karakteristik Sampah

Menurut Kastaman dan Kramadibrata (2007: 72) dalam (Riduan, 2021: 31) mengklasifikasikan beberapa jenis sampah yang terdapat di lingkungan masyarakat:

1. Sampah Basah (*garbage*), yaitu sampah yang susunannya terdiri atas bahan organik, mempunyai sifat mudah membusuk apabila dalam keadaan basah.

Sampah yang termasuk jenis ini adalah sisa makanan, sayur, buah, daun, dan sebagainya.

2. Sampah kering (*rubbish*), yaitu sampah yang terdiri atas bahan anorganik, sebagian besar atau seluruh bagiannya sulit membusuk. Sampah jenis ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Pertama, sampah kering logam seperti kaleng; pipa besi tua; mur; baut; seng; dan segala jenis logam. Kedua, sampah kering non logam, terdiri atas sampah kering mudah terbakar misalnya kertas; karton; kayu; kain bekas; kulit dan sampah kering sulit terbakar misalnya pecahan gelas; botol; kaca.
3. Sampah lembut, sampah yang susunannya terdiri atas partikel-partikel kecil dan memiliki sifat mudah berterbangan serta membahayakan atau mengganggu pernafasan dan mata. Sampah jenis ini terdiri atas: Pertama, debu sisa pengrajin kayu, debu asbes, debu pabrik tenun, debu pabrik semen. Kedua, abu sisa pembakaran kayu atau abu sekam, dan abu pembakaran sampah.

1.6.6.4. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Wonosobo tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah bertujuan untuk menjaga dan mengurangi jumlah dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah,

sehingga kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup dapat terjaga dan meningkat, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat merubah perilaku masyarakat melalui pengelolaan sampah.

Penanganan sampah dijelaskan didalam pasal 13 – 18 dilakukan melalui lima tahapan, yaitu: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

1. Pemilahan dilakukan oleh masyarakat pada sumbernya, pihak swasta, dan pemerintah daerah dengan memisahkan sampah berdasarkan jenisnya organik dan anorganik.
2. Pengumpulan sampah dilakukan di TPS atau TPS 3R oleh petugas pengelola sampah di lingkungan RT/RW atau kelompok masyarakat, pengelola kawasan komersil dan pengelola fasilitas umum.
3. Pengangkutan sampah dilaksanakan dari TPS atau TPS 3R menuju TPST atau TPA oleh Dinas Lingkungan Hidup atau pihak lain yang ditunjuk oleh dinas dengan menggunakan alat pengangkut sampah.
4. Pengolahan sampah dilakukan di TPST atau TPA untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dengan metode *reduce*, *reduce* dan *recycle* (3R).
5. Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan membuang sampah atau hasil pengolahan akhir ke lingkungan secara aman yang dilakukan di TPA dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

1.7. Operasional Konsep

Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Penelitian yang berjudul “Ketepatan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 (Pasal 13 Tentang Penanganan Sampah)”, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah dalam pasal 13 menyebutkan bahwa proses penanganan sampah dilakukan melalui: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Adapun fenomenanya sebagai berikut

1.7.1. Ketepatan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 (Pasal 13 Tentang Penanganan Sampah)

Implementasi Kebijakan merupakan suatu tindakan atau kegiatan pemerintah melalui sebuah keputusan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan dan didalamnya terdapat dampak atau akibat. Gejala implementasi berkaitan dengan:

1. Pemilahan
2. Pengumpulan
3. Pengangkutan
4. Pengolahan
5. Pemrosesan Akhir Sampah

Mengacu pada pasal 13 yang telah dijabarkan sebelumnya, maka fenomena Ketepatan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor

4 Tahun 2016 (Pasal 13 Tentang Penanganan Sampah) dengan menggunakan teori

5 ketepatan implementasi dari Riant Nugroho sebagai berikut:

1. Ketepatan kebijakan

- Kesesuaian isi kebijakan dengan permasalahan yang hendak diselesaikan.
- Tercapainya tujuan

2. Ketepatan pelaksana

- Peran pemerintah Kabupaten Wonosobo
- Peran masyarakat
- Peran swasta

3. Ketepatan target

- Kesiapan masyarakat dalam menerima kebijakan.
- Masyarakat mendukung atau menolak kebijakan

4. Ketepatan lingkungan

- Hubungan antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga terkait.
- Persepsi publik terhadap kebijakan, terutama dukungan kelompok sasaran.

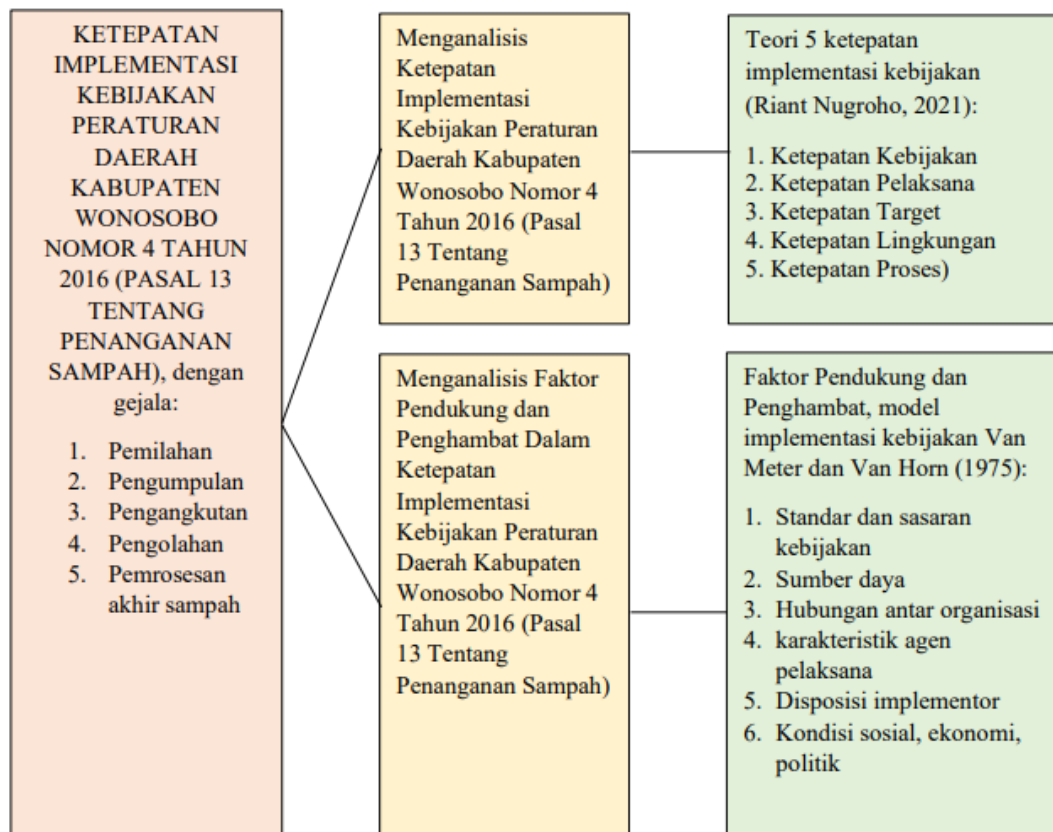
5. Ketepatan proses

- Kesiapan pelaksana kebijakan.
- Penerimaan Masyarakat

1.7.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Ketepatan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 (Pasal 13 Tentang Penanganan Sampah)

Adapun teori yang digunakan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yaitu teori Van Meter dan Van Horn sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan:
 - Standar pelaksanaan kebijakan
 - Sasaran kebijakan
2. Sumber daya
 - Sumber daya manusia (pegawai dan petugas) pada Dinas Lingkungan Hidup dan TPA Wonorejo
 - Sumber dana
 - Sarana dan prasarana penunjang
3. Hubungan antar organisasi
 - Kerjasama antara DLH dengan Organisasi Perangkat Daerah
4. Karakteristik Agen Pelaksana
 - Struktur birokrasi Dinas Lingkungan Hidup
 - Koordinasi pelaksanaan kebijakan
5. Disposisi Implementor
 - Pemahaman dan kesiapan Dinas Lingkungan Hidup
6. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi
 - Penerimaan masyarakat
 - Kesiapan masyarakat



Gambar 1.8. Kerangka Pikir
 Sumber: Riant Nugroho (2011); Syahrudin (2018)

1.8. Argumen Penelitian

Argumen penelitian berisi jawaban atau rumusan masalah yang ada sesuai dengan teori-teori yang terdapat pada literatur dan dibuat berdasarkan kerangka pemikiran teoritis. Kaitannya dengan penelitian ini yaitu pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo belum dapat mengatasi permasalahan sampah dengan optimal. Namun, kebijakan pengelolaan sampah dapat menjadi solusi untuk mengurangi timbulan sampah dan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Permasalahan sampah yang belum tertangani secara optimal membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo mengeluarkan kebijakan pengelolaan sampah untuk menjaga dan mengurangi

jumlah dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah, sehingga kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup dapat terjaga dan meningkat, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat merubah perilaku masyarakat melalui pengelolaan sampah

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. (Mack, dkk, 2005: 8) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan deskripsi tekstual secara kompleks tentang bagaimana pengalaman seorang peneliti dalam menjawab masalah penelitiannya. (Sugiyono, 2013: 9) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dan peneliti bertindak sebagai instrumen kunci.

(Hardani, 2020: 54) mengemukakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk menggambarkan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu, dan (Sugiyono, 2013: 53) menginterpretasikan kondisi saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.

Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan gejala sosial tertentu serta membandingkan fenomena-fenomena yang telah ditentukan dalam Ketepatan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 (Pasal 13 Tentang Penanganan Sampah).

1.9.2. Situs Penelitian

Situs penelitian dapat diartikan sebagai tempat dimana peneliti mendapatkan substansi permasalahan penelitian yang diteliti dengan ketersediaan data yang cukup sehubungan dengan permasalahan penelitian dan dapat menerima kehadiran peneliti dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo dan TPA Wonoerjo Kabupaten Wonosobo.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah individu atau kelompok yang disebut sebagai informan. Teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling*. Teknik ini dilakukan dengan cara memilih sampel dari suatu populasi yang dianggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik populasi (Pasolong, 2020: 107).

Untuk mendapatkan data kualitatif, subjek yang dipilih dalam penelitian ini adalah aktor-aktor yang berperan dan memahami permasalahan dalam Ketepatan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 (Pasal 13 Tentang Penanganan Sampah), aktor-aktor tersebut sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo.
2. Kasi Kebersihan/Pertamanan dan Pengawas Kegiatan
3. Pengawas Petugas Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo
4. Petugas TPA Wonorejo

5. Driver Truk Pengangkut Sampah
6. Petugas Pengumpul Sampah Rumah Tangga
7. Masyarakat Kabupaten Wonosobo

Dipilihnya informan tersebut diharapkan dapat mendukung kelengkapan data pada penelitian ini.

1.9.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data berupa kata-kata, sumber tertulis atau simbol, bukan dalam bentuk angka yang diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya: wawancara, analisis dokumen, observasi langsung serta dapat berupa gambar atau video. Data tersebut menggambarkan dan mempresentasikan kondisi penelitian dan permasalahan di lapangan.

1. Kata-kata

Kata-kata atau ucapan yang disampaikan dan diperoleh langsung melalui wawancara atau penuturan lisan oleh informan menjadi jenis data utama dalam penelitian ini.

2. Sumber tertulis

Sumber tertulis diperoleh dari dokumen, majalah, buku, surat kabar, jurnal, peraturan, dan sebagainya yang digunakan untuk memperkaya informasi dalam penelitian ini.

3. Foto atau gambar

Dokumentasi dalam penelitian digunakan sebagai pendukung dan bukti bahwa penelitian sedang atau telah dilaksanakan.

1.9.5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian Ketepatan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 (Pasal 13 Tentang Penanganan Sampah) berasal dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung dari lapangan. Data tersebut didapatkan melalui pertanyaan yang diajukan kepada informan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo, pengelola TPA Wonorejo, petugas pengumpul sampah, masyarakat Kabupaten Wonosobo mengenai Ketepatan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 (Pasal 13 Tentang Penanganan Sampah), selain itu sumber data berupa foto atau video didapatkan melalui observasi langsung di lapangan.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan pengelolaan sampah berupa tulisan dari buku, dokumen, jurnal, internet atau sumber lain yang relevan.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian harus menggunakan prosedur yang sistematis dan terstruktur untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Teknik observasi dalam penelitian digunakan untuk membantu peneliti mempelajari dan mengamati secara langsung perspektif objek yang diteliti sehingga dapat menunjang dalam penelitian. Observasi dapat membantu dalam mendapatkan pemahaman tentang sosial, budaya dan ekonomi dimana objek penelitian diteliti; hubungan atau interaksi diantara objek penelitian; seberapa sering dan dengan siapa perilaku dan aktivitas dilakukan. Melalui teknik observasi ini dapat menciptakan keakraban dengan lingkungan dimana penelitian dilaksanakan sehingga dapat memberikan manfaat selama penelitian berlangsung.

Observasi dapat dilakukan dengan terbuka dan tertutup. Observasi terbuka dilakukan secara langsung dengan melibatkan subjek penelitian dan subjek memberikan kesempatan untuk dilakukan proses pengamatan. Namun, dalam beberapa hal observasi dapat dilakukan secara tertutup.

Observasi dilakukan dengan menganalisis dan mencatat segala hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan faktor pendukung dan penghambat Ketepatan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 (Pasal 13 Tentang Penanganan Sampah).

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi terkait penelitian. Nazir (1999) dalam (Hardani, 2020: 137-138) memberikan pengertian wawancara adalah proses memperoleh

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber dan dibantu alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono, 2013: 140). Pedoman wawancara yang digunakan berupa poin-poin tertentu yang ditanyakan kepada narasumber terkait. Untuk mendapatkan jawaban yang lebih luas dan mendalam, penelitian ini juga menggunakan pertanyaan terbuka.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang tersedia (Hardani, 2020: 149). Metode dokumentasi bermanfaat sebagai pelengkap hasil pengumpulan data observasi dan wawancara.

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisa dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian baik data primer ataupun data sekunder terkumpul. Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data secara kualitatif sehingga dapat diuji kebenarannya. Dalam penelitian ini analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman yaitu, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, mengelompokkan, memilih, menyederhanakan data-data yang ditemukan di lapangan selama penelitian. Data yang dipilih merupakan data-data pokok sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya serta mencarinya bila perlu.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan (Hardani, 2020: 167). Miles dan Huberman berpendapat bahwa penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif (Sugiyono, 2013: 249).

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dideskripsikan dengan teks naratif, serta menggunakan grafik, gambar atau tabel untuk menyajikan data. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan langkah kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Kesimpulan

Kesimpulan awal dalam penelitian dapat menjawab rumusan masalah penelitian dan bisa tidak menjawab rumusan masalah, karena rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dapat diartikan sebagai temuan baru yang sebelumnya

belum pernah ada dan temuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek yang sebelumnya belum jelas (Sugiyono, 2013: 196)

Dari ketiga langkah analisis dan interpretasi data tersebut saling berkaitan satu sama lain dimana dalam melakukan penelitian dibutuhkan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dari data yang diperoleh tersebut dilakukan reduksi data atau merangkum data dengan memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan judul penelitian yaitu Ketepatan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 (Pasal 13 Tentang Penanganan Sampah).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan *software* ATLAS.ti. *Software* ini digunakan pada penelitian kualitatif karena memiliki keunggulan dalam membaca berbagai macam jenis data khususnya pada penelitian kualitatif. ATLAS.ti dapat membantu peneliti mengorganisasi, memberikan kode, dan menganalisis data penelitian secara efisien dan terstruktur.

1.9.8. Kualitas Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Untuk mendapatkan data yang valid dan reliable maka data diuji validitas dan reliabilitasnya. Kebenaran realitas data tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses setiap individu dengan berbagai latar belakang (Hardani, 2020: 199).

Teknik uji validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi dimana triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2013: 241). Sedangkan triangulasi dalam (Moelong, 2016: 330) adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Norman K. Denkin mengemukakan empat macam triangulasi yaitu triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan metode, triangulasi dengan teori, triangulasi dengan jalan membandingkan dengan sumber, metode dan teori (Moelong, 2016: 330).

Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi sumber tujuan untuk menguji keabsahan data berdasarkan teknik triangulasi dengan sumber. Hal ini dalam penelitian kualitatif menurut (Moelong, 2016: 331) dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda, prang pemerintahan.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi sebuah dokumen yang berkaitan.

Dalam pelaksanaannya, selain menggunakan triangulasi sumber data yang dilakukan dengan cara mengecek informasi/data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan, dokumen tertulis, arsip, gambar atau foto. Kemudian menanyakan kepada informan lain yang masih terkait satu sama lain. Penelitian ini juga menggunakan triangulasi metode yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan hasil wawancara dan observasi untuk mengecek kebenaran data.